

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Simpulan

Pada penelitian ini peneliti membuat dua simpulan yakni simpulan umum penelitian dan simpulan khusus penelitian. simpulan umum mencakup keseluruhan bahasan dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan simpulan khusus mencakup setiap rumusan masalah dalam penelitian.

##### 5.1.1. Simpulan Umum

Pendidikan anti-korupsi diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan salah satunya adalah melalui pengimplementasian pendidikan anti-korupsi ke dalam kajian keilmuan yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan Anti-korupsi, salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk membentuk warganegara yang baik dan cerdas yakni warganegara yang tahu akan hak dan kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran dalam pencegahan tindak pidana korupsi, perannya berhubungan dengan pengimplementasian pendidikan anti-korupsi di lembaga pendidikan, dalam hal ini pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat besar bahkan sebagai garda terdepan dalam pengimplementasiannya, hal ini dikarenakan pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan nilai bagi warganegara, dimana dimasa depan diharapkan generasi muda memiliki nilai luhur dalam dirinya termasuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai anti-korupsi. Pengimplementasian pendidikan anti-korupsi melalui pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menyertakan pendidikan anti-korupsi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, penggunaan metode dan model pembelajaran yang dapat menunjang peserta didik dalam memahami hingga menerapkan pendidikan anti-korupsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan model pembelajaran *problem based learning*, *project based learning* dan model pembelajaran lainnya. Pengimplementasian pendidikan anti-korupsi ke dalam pendidikan kewarganegaraan tentunya mengalami hambatan, namun hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan solusi dan tepat.

### 5.1.2. Simpulan Khusus

#### 5.1.2.1. Perbandingan Implementasi Pendidikan Anti-korupsi di Indonesia dan Singapura

Pengimplementasian pendidikan anti-korupsi di Indonesia dilakukan dengan tiga cara yakni 1) Strategi inklusi., 2) Strategi eksklusif., dan 3) Strategi studi kasus. Pengimplementasian pendidikan anti-korupsi di Indonesia dilakukan untuk pembinaan kejiwaan, pembinaan kerohanian, pembinaan kepribadian, pembinaan kejuangan dan pembinaan jasmani. Dalam pengimplementasian pendidikan anti-korupsi perlu menggunakan berbagai metode, model, dan media pembelajaran yang menunjang dalam pendidikan anti-korupsi di Indonesia, misalnya metode diskusi, skenario sistem dan lain sebagainya. Kebijakan pendidikan anti-korupsi diatur dalam Pasal 30 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Di Singapura kebijakan anti korupsi di Singapura diatur dalam Prevention of Corruption Act (PCA). Implementasi pendidikan anti-korupsi di Singapura tidak hanya diimplementasikan di lembaga pendidikan saja, namun juga lembaga-lembaga publik dan privat, melalui program pendidikan publik. Pendidikan anti-korupsi di Negara Singapura dapat dilakukan melalui perjalanan belajar (*learning Journey*) bagi para pelajar, video edukasi anti korupsi (*Anti-corruption Video*), sosialisasi di tempat kerja (*Talk at Workplaces*) bagi para tenaga kerja, sosialisasi pendidikan (*public education talk*), serta penggunaan media komik strip khusus (*Customised comic strips*).

Ada sembilan Nilai Anti-korupsi di Indonesia antara lain: 1) Nilai Kejujuran., 2) Nilai Keadilan., 3) Nilai Tanggung Jawab., 4) Nilai kedisiplinan., 5) Nilai kepedulian., 6) Nilai kerja keras., 7) Nilai kesederhanaan., 8) Nilai kemandirian., 9) Nilai keberanian. Sedangkan nilai anti-korupsi di Negara Singapura adalah 1) Nilai Kejujuran., 2) Nilai Keadilan., 3) Nilai Integritas dan 4) Nilai Keunggulan. Nilai-Nilai Acuan pendidikan anti-korupsi di Indonesia dan di Singapura ini, harus terwujud dalam pribadi bangsanya, agar terciptanya negara yang memiliki angka korupsi yang rendah.

#### 5.1.2.2. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan Nilai-Nilai Anti-korupsi

Rahma Halimatu Syadiah, 2022

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KE DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (*Studi Komparatif Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Singapura*)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pengimplementasian pendidikan anti-korupsi. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi garda terdepan sebagai mata pelajaran yang terinternalisasi dengan pendidikan anti-korupsi. Hal ini disebabkan karena pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan anti-korupsi memiliki kesamaan baik itu dalam tujuan dilaksanakan kedua pembelajaran tersebut, atau kesamaan keduanya sebagai pendidikan yang dirancang untuk membentuk sikap dan perilaku baik bagi generasi muda. Peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan Karakter Anti-korupsi dalam diri generasi muda. Peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan nilai-nilai anti-korupsi adalah, 1) peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan Pancasila., 2) Peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral. 3) Peran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan sikap dan perilaku anti-korupsi., 4) Peran pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran anti-korupsi dan kesadaran lainnya pada generasi muda dan masyarakat., 5) Peran pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana dalam menumbuhkan sikap nasionalisme.

### **5.1.2.3. Strategi Pengimplementasian Pendidikan Anti-korupsi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pengimplementasian pendidikan antikorupsi melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dapat dilakukan mulai dari pengembangan kurikulum, dan perancangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Strategi pengimplementasian pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan dapat dilakukan secara langsung dalam proses pembelajaran maupun secara tidak langsung. Strategi pengimplementasiannya adalah dengan, 1) melakukan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual melalui model pembelajaran yang dapat mendorong terbentuknya sikap anti-korupsi seperti model berbasis masalah, dan lain sebagainya., 2) Melakukan habituasi dan keteladanan., 3) Pengadaan sistem *Reward* dan *punishment*., 4) Pengimplementasian pendidikan anti-korupsi melalui dilema moral., 5) Pengimplementasian pendidikan anti-korupsi ke dalam pendidikan kewarganegaraan dengan penginversian., 6) Penggunaan model

pembelajaran *value clarification technique* (vct)., 7) Penggunaan media pembelajaran PETISI. Keberhasilan strategi dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi ke dalam pendidikan kewarganegaraan ditentukan oleh kerjasama antar pihak dalam mewujudkannya. Pengimplementasian pendidikan anti-korupsi ke dalam pendidikan kewarganegaraan juga harus melibatkan seluruh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta kecerdasan sosial.

#### **5.1.2.4. Hambatan Pengimplementasian Pendidikan Anti-korupsi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Implementasi pendidikan anti-korupsi ke dalam pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tentunya tidak selalu berjalan dengan baik, ada saja hal yang menjadi faktor penghambat pengimplementasian pendidikan anti-korupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. faktor-faktor penghambat pengimplementasian pendidikan anti-korupsi melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan terbagi menjadi dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pengimplementasiannya berkaitan dengan faktor yang timbul dalam diri seseorang baik itu pendidik maupun peserta didik. Sedangkan faktor eksternal yang menghambat implementasi pendidikan anti-korupsi melalui pendidikan kewarganegaraan, merupakan faktor yang muncul dari luar diri seseorang. Hambatan-hambatan tersebut tentunya dapat diatasi dengan menggunakan solusi yang tepat dan benar. Solusi dan strategi dalam mengatasi hambatan tersebut bisa merupakan peran pendidik, peserta didik, keluarga, masyarakat dan hal lainnya.

## **5.2. Implikasi**

Melalui penelitian yang dilakukan dapat ditarik implikasi penelitian sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini menjadi bukti bahwa pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan garda terdepan dan memiliki peran dalam pengimplementasian dan menanamkan pendidikan anti-korupsi bagi para generasi muda. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah

pendidikan yang berperan sebagai pendidikan karakter anti-korupsi, sehingga pendidikan kewarganegaraan berperan dalam mengarahkan dan menyelamatkan generasi muda dari setiap perilaku koruptif yang jika terus dilakukan akan mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi.

- 2) Penelitian ini juga membantu berbagai pihak dalam mengetahui bentuk-bentuk pengimplementasian pendidikan anti-korupsi serta faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasiannya.
- 3) Penelitian ini juga mendorong dan memberikan motivasi kepada setiap pihak untuk membantu pengimplementasian pendidikan anti-korupsi, karena pentingnya mempelajari pendidikan anti-korupsi ini.
- 4) Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang pengimplementasian pendidikan anti-korupsi di Singapura, hal ini bisa dijadikan sebagai perbandingan dengan mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi di Indonesia.

### **5.3. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, maka memunculkan suatu rekomendasi yang bertujuan untuk menyempurnakan dan memaksimalkan pengimplementasian pendidikan anti-korupsi di dunia pendidikan, maka muncul rekomendasi-rekomendasi berikut:

#### **5.3.1. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi**

- 1) Komisi pemberantasan korupsi hendaknya secara konsisten mengadakan sosialisasi wajib dan pelatihan terkait pendidikan anti-korupsi bagi para tenaga pendidikan, agar memahami apa itu pendidikan anti-korupsi dan bagaimana implementasinya.
- 2) Komisi pemberantasan korupsi hendaknya melakukan evaluasi terkait keberhasilan pendidikan anti-korupsi dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

#### **5.3.2. Bagi Kementerian Pendidikan**

- 1) Kementerian pendidikan hendaknya membantu mendukung terlaksananya pendidikan anti-korupsi di dunia pendidikan dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan tidak terlalu sering mengganti kurikulum

pendidikan yang dapat menghambat proses pembelajaran termasuk pembelajaran pendidikan anti-korupsi.

- 2) Kementerian pendidikan hendaknya memperbanyak buku terkait dengan pendidikan anti-korupsi sebagai bahan ajar bagi pendidik

### **5.3.3. Bagi Lembaga Pendidikan**

- 1) Lembaga pendidikan hendaknya secara konsisten dalam mengadakan pendidikan anti-korupsi di lembaga pendidikan
- 2) Lembaga pendidikan hendaknya selalu memberikan keteladanan bagi siswa dengan selalu menerapkan nilai-nilai anti-korupsi baik dalam sistem administrasi maupun perilaku.
- 3) Lembaga pendidikan hendaknya melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam terlaksananya pendidikan anti-korupsi secara efektif.

### **5.3.4. Bagi Tenaga Kependidikan Khususnya Ketenaga Pendidikan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

- 1) Tenaga pendidik hendaknya selalu memberikan keteladanan perilaku anti-korupsi bagi peserta didiknya.
- 2) Selalu membimbing peserta didiknya untuk senantiasa berperilaku anti-korupsi.
- 3) Tenaga pendidik juga hendaknya mengikuti sosialisasi dan pelatihan terkait dengan pendidikan anti-korupsi.
- 4) Hendaknya pendidik memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana dalam pelaksanaan pendidikan anti-korupsi.

### **5.3.5. Bagi Pelajar**

- 1) Pelajar hendaknya selalu membiasakan perilaku anti-korupsi di dalam kehidupannya baik di lingkungan lembaga pendidikan, keluarga maupun masyarakat.
- 2) Pelajar harus sering mempelajari terkait pendidikan anti-korupsi secara mandiri.
- 3) Melibatkan diri dalam segala bentuk kegiatan yang dapat membentuk perilaku anti-korupsi dalam diri.

### **5.3.6. Bagi Masyarakat Luas**

Rahma Halimatu Syadiah, 2022

*IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KE DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (Studi Komparatif Pendidikan Antikorupsi di Indonesia dan Singapura)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 1) Masyarakat luas hendaknya bisa membantu lembaga pendidikan dalam pengimplementasian pendidikan anti-korupsi dengan membiasakan sikap anti-korupsi serta memberikan contoh keteladanan anti-korupsi kepada generasi muda.
- 2) Masyarakat juga hendaknya membantu pengimplementasian pendidikan anti-korupsi dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk perilaku anti-korupsi generasi muda.

#### **5.3.7. Bagi Peneliti Selanjutnya**

- 1) Peneliti selanjutnya hendaknya lebih bisa melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi terkait dengan pengimplementasian pendidikan anti-korupsi serta perbandingannya dengan negara lain.
- 2) Selanjutnya peneliti selanjutnya hendaknya melakukan penelitian yang lebih baik lagi dari penelitian yang telah peneliti lakukan.